1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

   Pada Triwulan II tahun 2026, Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi Gorontalo mencatat inflasi sebesar 4,77% (YoY), berada di atas rentang sasaran inflasi nasional (2,5 ± 1% yoy). Tekanan inflasi di Provinsi Gorontalo berada di atas rentang sasaran inflasi nasional (2,5%±1 YoY). Tekanan inflasi di Provinsi Gorontalo disebabkan penurunan pasokan beberapa komoditas penyumbang inflasi di Provinsi Gorontalo, serta tingginya permintaan pada Pekan Nasional Kelompok Tani Nelayan Andalas (PENAS KTNA) XVII di Gorontalo. Selain itu, inflasi juga dipicu oleh kenaikan harga BBM nonsubsidi jenis Pertamax RON 92 dan tarif angkutan udara sebagai dampak dari dinamika kondisi geopolitik.

   Berdasarkan data perkembangan harga pada Dinas Kumperindag Provinsi Gorontalo, pada triwulan II 2026, komoditas cabai rawit mengalami fluktuasi harga yang cukup tinggi. Pada minggu pertama bulan April 2026, harganya mencapai Rp130.000 per kg, kemudian mengalami penurunan secara perlahan dan pada minggu keempat April 2026, harganya Rp45.000 per kg. Kemudian pada bulan Mei 2026, harga cabai rawit dikisaran Rp50.000 – Rp70.000 per kg. Namun pada bulan Juni 2026, harga capai rawit dikisaran Rp120.000 – 100.000 per kg.

   Beras merupakan komoditas utama (bahan pangan pokok) di Indonesia yang memiliki bobot perhitungan sangat besar dalam keranjang komoditas inflasi, sehingga kenaikan harga beras secara langsung akan mendorong inflasi daerah. Komoditas beras pada bulan Mei 2026 menyumbang inflasi sebesar 0,05% dan Juni 2026 sebesar 0,19%. Harga beras pada triwulan II-2026 yang mengalami kenaikan adalah jenis Ciheran dan Super Win. Beras Ciheran harga Rp16.250 per kg naik menjadi Rp16.875 per kg dan Beras Super Win harga Rp16.250 per kg naik menjadi Rp17.500 per kg.

   Komoditas Bawang Merah pada triwulan II 2026, harganya juga mengalami fluktuasi. Bawang merah produksinya masih cukup terbatas di Gorontalo, sehingga masih mendatangkan dari daerah luar, yaitu dari daerah Enrekang Sulawesi Selatan dan Bima, NTT. Harga bawang merah pada bulan April – Mei 2026, harganya dikisaran Rp50.000 – Rp60.000 per kg. Namun pada bulan Juni 2026, harganya mencapai Rp100.000 per kg.

   Terdapat 4 (empat) risiko inflasi utama yang perlu diwaspadai pada bulan-bulan berikutnya. Pertama, berlanjutnya gangguan pasokan beberapa komoditas pangan, terutama beras dan bawang merah, akibat dari El Nino Moderat di sentra produsen (Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah). Kedua, meningkatnya risiko *imported inflation* seiring dengan gejolak geopolitik yang turut mempengaruhi jalur distribusi global, terutama pada barang elektronik, gandum, plastic, dan bahan baku transportasi. Ketiga, potensi peningkatan permintaan terhadap komoditas pangan seiring dengan perluasan pelaksanaan program strategis Makan Bergizi Gratis yang ditargetkan untuk beroperasional 100% di tahun 2026. Keempat, masih tingginya ketidakpastian ekonomi yang berpotensi meningkatkan harga pupuk, kedelai, daan minyak.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

   Tekanan inflasi di Provinsi Gorontalo umumnya disebabkan dari kelompok *volatile food*. Pada

triwulan II–2026, komoditas yang sering menyumbang inflasi adalah, BARITO (Bawang, Rica, dan Tomat), Beras, dan Ikan segar.

Peningkatan harga tomat disebabkan oleh meningkatnya permintaan dari dalam dan luar daerah sekitar Gorontalo dan adanya keterbatasan dari hasil panen sebelumnya. Mayoritas pasokan tomat di Gorontalo berasal dari luar daerah sehingga memiliki sensitivitas perubahan harga yang tinggi terhadap perubahan pasokan dari luar.

Komoditas cabai rawit dan bawang merah mengalami peningkatan harga disebabkan meningkatnya permintaan pada periode PENAS KTNA XVII ditengah keterbatasan pasokan dua komoditas baik dari dalam Provinsi Gorontalo maupun dari luar Provinsi Gorontalo, khususnya Sulawesi Tengah (cabai rawit) dan Sulawesi Selatan (bawang merah) serta pergeseran fokus petani local yang Kembali ke komoditas jagung pakan.

Komoditas Ikan segar mengalami peningkatan harga dipengaruhi oleh angin muson timur yang meningkatkan kecepatan angin dan ketinggian gelombang laut, sehingga membatasi aktivitas nelayan untuk melaut. Kemudian untuk komoditas beras juga mengalami peningkatan harga dikarenakan keterbatasan pasokan dari hasil panen di periode April/Mei seiring dengan telah berlangsungnya periode panen raya pada triwulan I 2026, serta meningkatnya permintaan dari dari dalam dan luar daerah sekitar Gorontalo.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Berbagai strategi pengendalian inflasi terus dilakukan dan menekankan pentingnya sinergi antar instansi untuk mendorong kembali realisasi inflasi agar tetap berada dalam sasaran target inflasi nasional. Program-program dirumuskan dengan tetap mengacu pada *roadmap* pengendalian inflasi dengan mengedepankan prinsip 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distrbusi, dan Komunikasi yang Efektif). TPID Provinsi Gorontalo pada Triwulan II – 2026 telah melakukan sejumlah upaya pengendalian harga pangan sebagai berikut:

Keterjangkauan Harga

1. Pasar murah bersubsidi dalam rangka peringatan HUT ke-80 TNI Angkatan Udara
2. Penyerahan Bantuan Langsung Pemerintah Provinsi Gorontalo (BLP3G) di Kecamatan Paguyaman sebanyak 200 KPM, Kecamatan Wonosari sebanyak 225 KPM, dan Kabupaten Gorontalo sebanyak 170 KPM.
3. Pelaksanaan GPM di kabupaten/kota
4. Pemerintah daerah bersama Bank Indonesia, Bulog, dan instansi terkait memperkuat pemantauan harga harian early warning system yang rutin disampaikan dalam rakor mingguan guna mengantisipasi kenaikan harga komoditas strategis.
5. Optimalisasi Toko Pengendalian Inflasi/Kios Inflasi di pasar utama di Kota Gorontalo, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Bone Bolango, dan Kabupaten Boalemo

Ketersediaan Pasokan

1. Bantuan tambahan benih jagung untuk lahan seluas 16ribu Ha oleh Kementan
2. Gerakan menanam jagung di lahan kosong sepanjang jalan GORR
3. Penyaluran Beras SPHP TA. 2026 sebanyak 299.447,59 Kg ke Kabupaten/Kota di Provinsi Gorontalo

Realisasi Kerjasama Antar Daerah secara B to B untuk komoditas hortikultura khususnya

4. tomat antara BUMDES Kabupaten Gorontalo dengan BUMD Kabupaten Minahasa Utara
5. Peningkatan produksi pangan lokal melalui Gerakan tanam di beberapa kabupaten/kota seperti Gerakan Agro Mopomulo di Kabupaten Gorontalo Utara
6. Pelaksanaan tanam bawang merah di 4 area, yaitu 3 area nerupakan binaan BI (Bone Pantai, Gapoktan Pangan Sari, dan Ponpes Hubulo) dan 1 area binaan Pemda, yaitu di daerah Dulamayo.
7. Penjajakan KAD B to B komoditas bawang merah antara pelaku usaha Provinsi Gorontalo dengan Pelaku usaha bawang merah di Enrekang, Sulsel
8. Peningkatan produksi pangan lokal melalui Gerakan tanam di beberapa wilayah seperti Gerakan Agro Mopomulo di Kabupaten Gorontalo Utara dan Boalemo.
9. Program Aksi Kokurikuler Ketahanan pangan melalui budidaya bibit cabai dan tomat yang dilaksanakan di SMA Negeri 2 Limboto
10. Gerakan tanam padi bersama kelompok Tani Ohilawa, Desa Boludawa, Kecamatan Suwawa.

Kelancaran Distribusi

1. KAD antara Pemkab Bone Bolango dan Kota Tomohon untuk komoditas aneka tanaman hortikultura
2. Intensifikasi koordinasi dengan BULOG dan Pertamina dalam rangka menjaga kelancaran distribusi pasokan beras, minyak goreng, gula, dan BBM kepada Masyarakat di Provinsi Gorontalo
3. Fasilitasi distribusi pangan oleh Pemda dalam pelaksanaan GPM di kabupaten/kota di Provinsi Gorontalo
4. Fasilitasi distribusi pangan oleh Bank Indonesia pada pelaksanaan GPM selama PENAS 2026 di Taman Budaya Limboto, Kabupaten Gorontalo

Komunikasi Efektif

1. Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbangda) RKPD 2027 oleh Provinsi Gorontalo dan Kota Gorontalo
2. Penyelenggaraan High Level Meeting (HLM) TPID Provinsi Gorontalo (25 Mei 2026), Kabupaten Gorontalo Utara (5 Mei 2026), Kabupaten Gorontalo (18 Mei 2026), dan Kabupaten Boalemo (20 Mei 2026)
3. Capaian Provinsi Gorontalo sebagai Provinsi Terbaik 1 untuk Regional Sulawesi dalam pengendalian inflasi daerah 2026 dalam kegiatan Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi 2026 Regional Sulawesi yang diselenggarakanoleh Kemnterian Dalam Negeri RI.
4. Capacity Building TPID se Provinsi Gorontalo di Provinsi Jawa Tengah tahun 2026 dalam rangka Studi Tiru pengendalian inflasi, termasuk pengembangan klister bawang merah.
5. Rakor pemetaan distribusi komoditas pangan yang masuk ke Provinsi Gorontalo yang dipimpin Gubernur Gorontalo

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi daerah di Provinsi Gorontalo pada Triwulan II Tahun 2026 diarahkan untuk menjaga stabilitas harga, menjamin ketersediaan dan kelancaran pasokan komoditas pangan strategis, menjaga keterjangkauan harga bagi masyarakat, serta

memperkuat koordinasi dan sinergi antar-Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Kebijakan pengendalian inflasi dilaksanakan dengan mengacu pada strategi 4K, yaitu keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta komunikasi efektif, dengan memperhatikan perkembangan harga komoditas pangan strategis dan faktor eksternal yang memengaruhi inflasi daerah.

Berbagai langkah yang dilakukan meliputi pemantauan harga dan pasokan pangan strategis, pelaksanaan Gerakan Pangan Murah dan pasar murah bersubsidi, penguatan koordinasi dengan stakeholder terkait, serta rencana pengembangan Kerja Sama Antar Daerah (KAD).

Secara umum, kebijakan tersebut mampu menjaga stabilitas harga pada sebagian periode Triwulan II 2026. Namun, pada akhir triwulan masih terdapat peningkatan tekanan inflasi, terutama yang dipengaruhi oleh perkembangan harga komoditas pangan strategis dan faktor distribusi serta adanya event nasional PENAS KTNA XVII di Gorontalo. Kondisi ini menjadi bahan evaluasi bagi TPID untuk meningkatkan langkah antisipatif melalui penguatan ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, optimalisasi intervensi pasar, serta pemantauan harga secara lebih intensif.

Ke depan, TPID Provinsi Gorontalo akan terus memperkuat sinergi lintas sektor dan meningkatkan kebijakan pengendalian inflasi yang lebih responsif, terukur, dan berbasis data, dengan fokus pada komoditas penyumbang inflasi serta penguatan KAD guna menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Berdasarkan evaluasi pelaksanaan pengendalian inflasi daerah pada triwulan II-2026, maka rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di Provinsi Gorontalo dalam rangka menjaga pasokan, keterjangkauan harga serta mengendalikan inflasi daerah, diharapkan kepada Pemerintah Provinsi, Kota dan Kabupaten melakukan hal-hal sebagai berikut

Keterjangkauan Harga

1. Mengoptimalkan pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM), pasar murah, dan intervensi pasar secara lebih tepat sasaran, khususnya pada wilayah dan komoditas yang mengalami tekanan harga tinggi.
2. Mengintensifkan pemantauan harga komoditas pangan bergejolak khususnya beras, cabai rawit, bawang merah, bawang putih, tomat, dan minyak goreng melalui pemanfaatan *early warning system (*SP2KP/PIHPS BI*)* atau pemantauan langsung oleh anggota TPID

Ketersediaan Pasokan

1. Memperkuat ketersediaan dan cadangan pangan daerah, terutama beras, cabai, bawang merah, telur ayam ras, dan daging ayam ras melalui peningkatan produksi lokal, penguatan stok, serta koordinasi dengan Bulog dan pelaku usaha.
2. Pelaksanaan Kerja Sama Antar Daerah (KAD) dengan daerah sentra produksi, terutama untuk menjamin kontinuitas pasokan komoditas pangan yang belum dapat dipenuhi dari produksi lokal Gorontalo khususnya komoditas bawang merah.
3. Menjaga ketersediaan pasokan komoditas pangan, khususnya Beras melalui perluasan penyaluran Beras SPHP oleh BULOG

Kelancaran Distribusi

1. Pemanfaatan Tol laut untuk memperlancar distribusi
2. Fasilitasi distribusi pangan pada pelaksanaan GPM.

Komunikasi Efektif

1. Mengintensifkan publikasi layanan masyarakat belanja bijak yang bekerjasama dengan RRI dan TVRI serta memanfaatkan media sosial lainnya.
2. Memperkuat koordinasi TPID Provinsi dan TPID Kabupaten/Kota dalam menyusun langkah pengendalian inflasi yang terpadu, terutama menghadapi periode risiko seperti hari besar keagamaan dan perubahan cuaca.